

Pengaruh Otonomi Daerah, Belanja Pemerintah, dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali Tahun 1993-2012

Melasia Agustina
I Gusti Bagus Indrajaaya

Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana

ABSTRAK

Terlaksananya otonomi daerah memberi suatu peluang bagi setiap daerah untuk meningkatkan penerimaan daerahnya melalui pengembangan potensi daerah. Pemanfaatan sumber daya daerah secara efektif dapat memacu aktivitas perekonomian di daerah, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh simultan dan parsial otonomi daerah, pengeluaran pemerintah, dan tenaga kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali tahun 1993-2012. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali. Teknik analisis yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah model analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan otonomi daerah, pengeluaran pemerintah, dan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali Tahun 1993-2012. Secara parsial pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan otonomi daerah tidak berpengaruh signifikan.

Kata kunci : Otonomi Daerah, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja, Produk Domestik Regional Bruto

ABSTRACT

Implementation of regional autonomy gives an opportunity for each region to improve the region's revenue potential through the development of elapsed areas. Utilization of local resources can effectively spur economic activity in the region. Which in turn can improve the welfare of society. This study aims to determine the effect of simultaneous and partial autonomy, government spending, and labor to the Gross Regional Domestic Product of Bali in 1993-2012. Data used in this study is secondary data obtained from BPS. The analysis technique used to solve the problem in this research is the multiple linear regression analysis model. The result showed that simultaneous decentralization, government spending, and labor significantly influence the Gross Regional Domestic Product of Bali from 1993 to 2012. Partially government spending and labor have positive and significant, whereas no significant effect of regional autonomy.

Keyword : autonomy, government spending, labour, gross regional domestic product.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya - sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999:11). Tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk meningkatkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas.

Tingkat pertumbuhan daerah merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya pendapatan perkapita riil yang berlangsung terus-menerus yang bersumber dari dalam daerah. Menurut Sufyetti (2012) Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kegiatan ekonomi. Jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan positif, berarti kegiatan ekonomi pada periode tersebut mengalami peningkatan. Sedangkan jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan negatif, berarti kegiatan ekonomi pada periode tersebut mengalami penurunan.

Pertumbuhan ekonomi dapat tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah tersebut. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah.

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang - undang No. 32 tahun 2004 dan Undang - undang No. 33 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, sistem pemerintahan yang semula sentralistis beralih menjadi desentralisasi, artinya pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat dan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Menurut Zhouhaier (2012) pemberian otonomi daerah kepada pemerintah daerah dapat memberikan iklim yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam memantapkan kemandirian pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan otonomi daerah yang lebih nyata, diperlukan upaya - upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme sumber daya manusia dan lembaga-lembaga publik di daerah dalam mengelola sumber daya daerah sehingga otonomi yang diberikan kepada daerah akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah yang harus diatur secara hati - hati. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari penerimaan dan belanja daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan penerimaan lain-lain yang sah. Belanja daerah adalah belanja yang tertuang dalam APBD yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah, pembangunan daerah. Menurut Mangkoesobroto (2008:169), pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Ollukayode (dalam Inuwa, 2012), menyebutkan bahwa pengeluaran pemerintah adalah salah satu instrument penting untuk mengontrol perekonomian. Menurut Keynes dan Deliarinov (dalam Berutu, 2009), pemerintah perlu berperan dalam perekonomian dengan mengambil kebijakan fiskal. Pemerintah dapat mempengaruhi jalannya perekonomian dengan menggunakan kebijakan fiskal. Semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang produktif maka semakin memperbesar tingkat perekonomian suatu daerah (Lin, 1994). Pengeluaran pemerintah mempunyai hubungan yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi karena belanja pembangunan ditujukan untuk membiayai fungsi *agent of development* dan dari pengeluaran ini akan menghasilkan kembali produk-produk yang sangat diperlukan untuk meningkatkan perekonomian.

Sumber daya manusia merupakan modal pembangunan yang penting selain keuangan daerah. Cepat lambatnya proses pembangunan tergantung pada sejauh mana sumber daya manusia selaku subjek pembangunan memiliki potensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan. Menurut Tambunan (dalam Isnawati, 2012) kemajuan iptek dan sumber daya manusia menjadi sumber penting bagi pertumbuhan. Partisipasi aktif dari seluruh

masyarakat akan mempercepat pembangunan daerah. Berdasarkan uraian latar belakang, tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Mengetahui pengaruh Otonomi Daerah, Belanja Pemerintah dan Tenaga Kerja secara serempak terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi Bali tahun 1993 – 2012.
- 2) Mengetahui pengaruh Otonomi Daerah, Belanja Pemerintah dan Tenaga Kerja secara parsial terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi Bali tahun 1993 – 2012.

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi masukan kepada pengambil kebijakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)..

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Provinsi Bali. Provinsi Bali dilihat dari luas wilayah dan sumber dayanya memiliki potensi dan peluang besar dalam meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali. Objek penelitian ini adalah otonomi daerah, belanja pemerintah, tenaga kerja dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali tahun 1993 - 2012.

Jenis dan Sumber Data

Data kualitatif dalam penelitian ini adalah data berupa gambaran umum mengenai kondisi belanja pemerintah, tenaga kerja, dan produk domestik regional bruto di Provinsi Bali dan data kuantitatif dalam penelitian ini ini berupa data-data yang tersaji dalam bentuk tabel yang diperoleh dari (BPS) Provinsi Bali.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan statistik yaitu pendekatan regresi linear berganda. Analisis ini berguna untuk mengetahui pengaruh otonomi daerah, belanja pemerintah, dan tenaga kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali pada tahun 1993-2012. Model linear berganda, menurut Gujarati (2006) dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu_i \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan :

Y = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 1993-2012

X₁ = Variabel Dummy

Dummy = 0 : Sebelum pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah

Dummy = 1 : Sesudah pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah

X₂ = Pengeluaran pemerintah Provinsi Bali tahun 1993-2012

X₃ = Tenaga kerja Provinsi Bali tahun 1993-2012

α = Intersep (konstanta)

β = Koefisien regresi

μ_i = Tingkat kesalahan (gangguan) stokastik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Bali dikenal dengan sebutan Pulau Dewata (*paradise island*). Bali terletak diantara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Ibukota provinsinya adalah Denpasar, yang terletak di bagian selatan pulau ini. Luas wilayah Provinsi Bali secara keseluruhan mencapai 5.636,66 km². Secara astronomis, Provinsi Bali terletak pada posisi titik koordinat 08°03'40" - 08°50'48"

lintang selatan dan 114°25'53" - 115°42'40" bujur timur yang membuat beriklim tropis layaknya wilayah lain di Indonesia. Adapun batas - batas wilayah Provinsi Bali sebagai berikut; batas utara dengan Laut Bali, batas selatan dengan Samudera Indonesia, batas barat dengan Selat Bali, batas timur dengan Selat Lombok

Peningkatan kinerja ekonomi Provinsi Bali tercermin secara lebih jelas dari nilai tambah riil yang tercipta atau dikenal dengan PDRB harga konstan. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan di Provinsi Bali. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang memiliki keterkaitan paling erat dengan industri pariwisata tampak paling dominan dengan kontribusi terhadap PDRB rata-rata sebesar 30 persen, bahkan angkanya cenderung terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada posisi kedua ditempati oleh sektor pertanian dengan kontribusi terhadap PDRB rata-rata sebesar 16 persen. Secara umum perekonomian Provinsi Bali masih didominasi oleh sektor tersier. Hal ini sebagai akibat dari *multiflier effect* yang ditimbulkan dari perkembangan sektor perdagangan, hotel, dan restoran, khususnya pariwisata, dimana seperti diketahui Provinsi Bali merupakan salah satu daerah tujuan wisata.

Salah satu implikasi dari adanya otonomi daerah adalah daerah memiliki wewenang yang jauh lebih besar dalam mengelola daerahnya, baik itu dari sisi pelaksanaan pembangunan maupun pembiayaannya. Belanja pemerintah Provinsi Bali setiap tahunnya didominasi oleh belanja tidak langsung yang rata-rata hampir mencapai 60 persen dari total belanja daerah. Sebagian besar belanja tidak langsung tersebut dialokasikan pada pos belanja pegawai, peningkatan belanja pegawai yang selalu meningkat tiap tahunnya disebabkan adanya pengangkatan pegawai harian daerah menjadi CPNS, dan adanya kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat pegawai.

Ketenagakerjaan di Provinsi Bali masih menjadi fenomena pelik. Provinsi Bali dengan wilayah yang mudah dijangkau, arus migrasi dan urbanisasi menjadi masalah yang tak terhindarkan. Situasi ini mempengaruhi struktur ketenagakerjaan, yaitu kemungkinan menggelembungnya penduduk usia kerja. Maka dari itu, perluasan kesempatan kerja perlu dioptimalkan secara produktif.

Sektor pertanian dan pariwisata, sejauh ini masih menjadi ujung tombak perekonomian Provinsi Bali. Terlepas dari permasalahan yang ada, sektor pertanian dalam arti luas masih memegang peran strategis bagi ketenagakerjaan di Provinsi Bali. Selain sektor pertanian dalam arti luas, sektor pariwisata menempati posisi yang tidak kalah pentingnya dalam struktur penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. Berkembangnya pariwisata di Provinsi Bali, menyebabkan struktur perekonomian Bali mengalami pergeseran dari sektor primer ke sektor tersier. Hal ini berarti banyak usaha yang dapat digerakkan oleh sektor pariwisata seperti kegiatan biro perjalanan, transportasi, perhotelan, restoran, kesenian dan budaya daerah, industri kerajinan, tempat hiburan dan rekreasi, pameran yang diselenggarakan di daerah-daerah, serta kegiatan informal seperti pedagang acung dan kegiatan-kegiatan lainnya. (BPS Provinsi Bali)

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini dipakai untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dimana variabel independennya adalah otonomi daerah, belanja pemerintah, dan tenaga kerja. Variabel terikatnya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali. Hasil pengolahan data yang diperoleh yaitu :

$$\hat{Y} = -7917,84 - 178,043 X_1 + 0,002 X_2 + 14,617 X_3 \dots\dots\dots (2)$$

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	-7917.811	3363.606		-2.354	.032
	otonomi daerah	-178.043	524.239	-.016	-.340	.739
	pengeluaran pemerintah	.002	.001	.399	4.623	.000
	tenaga kerja	14.617	2.140	.622	6.829	.000

a. Dependent Variable: PDRB

Sumber : Data Diolah

1. Uji Signifikansi Koefisien Regresi

a. Uji Simultan (F-test)

Uji F-test bertujuan untuk menguji signifikansi variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan. Berdasarkan hasil pengujian diketahui F hitung model regresi ini adalah 321,507 lebih besar dari F tabel = 3,24 atau dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, maka variabel bebas yaitu otonomi daerah, belanja pemerintah, dan tenaga kerja memiliki pengaruh simultan dan signifikan terhadap PDRB Provinsi Bali.

b. Uji Parsial (t-test)

Tujuan uji parsial untuk mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

1) Pengaruh otonomi daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa otonomi daerah (X_1) memiliki nilai t hitung sebesar -0,340. Angka tersebut menjelaskan otonomi daerah tidak berpengaruh nyata terhadap PDRB di Provinsi Bali, hal tersebut dikarenakan nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel = 1,746. Selain itu tingkat signifikansi variabel ini lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi yang digunakan, yaitu $0,739 < 0,05$, sehingga H_0 diterima. Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ruliansyah (2010) yang menemukan bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh langsung namun tidak signifikan terhadap PDRB di Provinsi Kalimantan Timur. Vasquez (2001) mengatakan bahwa desentralisasi akan mempunyai dampak langsung terhadap PDRB apabila desentralisasi fiskal dipusatkan pada pengeluaran publik atau belanja langsung.

2) Pengaruh belanja pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa belanja pemerintah (X_2) memiliki nilai t hitung sebesar 4,623. Angka tersebut menjelaskan belanja pemerintah memiliki pengaruh yang nyata terhadap PDRB di Provinsi Bali, hal tersebut dikarenakan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel = 1,746. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sitaniapessy (2013) yang menemukan variabel pengeluaran pemerintah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Maluku. Pengaruh signifikan dari belanja pemerintah terhadap PDRB menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah yang selama ini dilaksanakan bersifat produktif dan efektif karena berkontribusi langsung terhadap kenaikan PDRB.

3) Pengaruh tenaga kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali

Berdasarkan hasil pengujian dengan SPSS diketahui bahwa tenaga kerja (X_3) memiliki nilai t hitung sebesar 6,829. Angka tersebut menjelaskan tenaga kerja berpengaruh nyata

terhadap PDRB di Provinsi Bali, hal tersebut dikarenakan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel = 1,746. Selain itu tingkat signifikansi variabel ini lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi yang digunakan, yaitu $0,000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suryono (2008) yang menemukan bahwa secara parsial variabel tenaga kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah. Pengaruh signifikan dari tenaga kerja terhadap PDRB terutama disebabkan posisi tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi yang menggerakkan perekonomian di daerah.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Penelitian ini menggunakan uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov Z (I-Sampel K-S)*. Dari hasil pengolahan, residual model terdistribusi secara normal. Hal ini terlihat dari nilai *Asymp Sig (2-tailed)* sebesar 0,66 yang lebih besar dari 0,05.

b. Uji Multikolinearitas

Dari hasil pengolahan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Tolerance dari otonomi daerah, belanja Pemerintah, dan tenaga kerja diatas 0,10 dan VIF dibawah 10. Ini berarti tidak terjadi multikolinearitas antara otonomi daerah (X_1), Belanja Pemerintah (X_2), dan tenaga kerja (X_3).

c. Uji Autokolerasi

Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokolerasi adalah dengan menggunakan Uji Run (*Run's Test*). Oleh karena hasil uji run tidak signifikan atau dengan *Asymp Sig (2-tailed)* lebih besar dari 0,05, maka diputuskan bahwa dalam model yang dibuat tidak terjadi gejala autokolerasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas dilakukan dengan Uji *Glejser*, yang dilakukan dengan meregresikan variabel bebas nilai absolut residual $|e_i|$. Dari hasil pengolahan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa koefisien otonomi daerah (X_1), Belanja Pemerintah (X_2), dan tenaga kerja (X_3) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap absolute residual dari model regresi. Jadi disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Otonomi daerah, belanja pemerintah dan tenaga kerja secara serempak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB Provinsi Bali tahun 1993-2012.
2. Belanja pemerintah dan tenaga kerja secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PDRB Provinsi Bali tahun 1993-2012. Sedangkan otonomi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB Provinsi Bali tahun 1993-2012.

SARAN

Saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten/Kota di Provinsi Bali seharusnya lebih menggali segala potensi-potensi yang ada guna mengoptimalkan kemampuan daerah di bidang keuangan, kemudian ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin agar

peran pemerintah daerah menjadi lebih besar sehingga otonomi daerah dapat memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan PDRB.

2. Pemerintah Provinsi Bali diharapkan dapat meningkatkan jumlah belanja pemerintah setiap tahunnya karena terbukti dapat meningkatkan PDRB Provinsi Bali. Jumlah tenaga kerja Provinsi Bali yang memberikan pengaruh positif terhadap PDRB, sebaiknya diimbangi dengan adanya peningkatan kualitas tenaga kerja. Dengan adanya peningkatan kualitas tenaga kerja maka akan meningkatkan produktifitas para pekerja untuk menghasilkan output. Peningkatan kualitas tenaga kerja salah satunya dapat dilakukan dengan cara meningkatkan prasarana pelatihan untuk para pencari kerja,

REFERENSI

- Arsyad, Lincoln. 1999. Pengantar *Perencanaan & Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali. 1993-2012. Bali Dalam Angka. Provinsi Bali. BPS.
- Berutu, Monanda Reza. 2009. Pengaruh APBD terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Dairi. *Skripsi*. Sarjana Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Gujarati, Damodar. 2006. *Ekonometrika Dasar* (Penerjemah: Sumarno Zain). Jakarta: Erlangga
- Inuwa, Nasiru. 2012. Government Expenditure and Economic Growth in Nigeria : Cointegration Analysis and Causality Testing. *Academic Research International*. Vol. 2, No. 3, 718-723
- Isnowati, Sri. 2012. Penerapan Model Kweka dan Morissey dalam Menerangkan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*. Vol. 19, No. 1 Halaman: 25-36.
- Lin, Say. 1994. Government Spending and Economic Growth. *Journal Economic*. 26: 83-94
- Mangkoesebroto, G. 2008. *Ekonomi Publik, Edisi 3*. Yogyakarta: BPFE.
- Ruliansyah, Denny. 2010. Analisis hubungan antara PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), Realisasi Investasi, Desentralisasi Fiskal dan Kesempatan Kerja di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman*.
- Sitaniapessy, Harry A. P. 2013. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB dan PAD. *jurnal Economia*. Volume 9, Nomor 1, halaman: 38-51.
- Sufyetti. 2012. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pembangunan di Kabupaten Agam. Dalam *Jurnal Kajian Ekonomi*. Vol.1, No. 1, hal: 165-186.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Andi

Pengaruh Otonomi Daerah, Pengeluaran Pemerintah,... [Melasia Agustina, I Gusti Bagus Indrajaya]

Suryono, Wiratno Bagus. 2008. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Investasi, dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Jawa Tengah. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro*.

Vasquez, Jorge Martinez and Robert M. Mc-Nab. 2001. Fiscal Decentralization, Macrostability, and Growth. *Journal of Political Econom.* 68: 423-435

Zouhaier, Hadhek. 2012. Institutions, Investment and Economic Growth. *International Journal of Economics and Finance*. Vol.4, No.2, 152-162.